

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Hutan yang berada dalam kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara. Kawasan hutan ialah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kemudian dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 dijelaskan bahwa kawasan hutan memiliki 3 fungsi pokok yakni konservasi, lindung dan produksi. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Perubahan fungsi kawasan hutan ini diatur dalam pasal 19 dan pada Pasal 38 juga mengatur tentang penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Kebijakan yang didasarkan atas undang-undang ini, juga diharapkan agar berpengaruh penting serta bernilai strategis bagi perekonomian suatu wilayah. Sehingga diharapkan perubahan fungsi kawasan hutan tidak hanya berpengaruh terhadap luas kawasan hutan Indonesia secara langsung, tetapi juga berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Sumberdaya tanah yang merupakan masukan yang penting untuk kegiatan-kegiatan produktif dan bernilai ekonomi seringkali harus mengorbankan kawasan hutan.

Evaluasi menurut pengertian istilah, Thoha (2003:1) mengatakan bahwa “evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolok ukur untuk memperoleh kesimpulan.”

Secara umum, Cross dalam Sukardi (2005:1), berpendapat bahwa “evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi, dimana suatu tujuan telah tercapai.” Hal ini dijelaskan lagi oleh Sukardi (2015: 1), bahwa definisi tersebut menerangkan secara langsung bahwa evaluasi merupakan proses mendapatkan informasi dan memahami serta mengkomunikasikan hasil informasi tersebut kepada pemangku keputusan.

Menurut Edwin Wand dan Gerald W. Brow dalam bukunya *Essensial of Educational of Education* mengemukakan bahwa: Evaluation refer to act or process to determining the value the something. “Evaluasi merupakan kegiatan terencana untuk menentukan nilai daripada sesuatu. Evaluasi merupakan proses pengumpulan data untuk menentukan sejauhmana dalam hal apa dan bagaimana tujuan mudah tercapai.1 Evaluation is process whice determines the extent to which objectives have been achieved. Artinya “Evaluasi adalah proses yang menentukan kondisi dimana tujuan telah mudah tercapai”.

Evaluasi adalah suatu proses yang dilakukan dalam rangka menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai positif dan keuntungan suatu program, serta mempmelakukan suatu penelitian.2 Evaluasi merupakan kegiatan untuk menentukan nilai atau harga tentang sesuatu, termasuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produk, prosedur, serta alternatif strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Dari berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan kegiatan terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen yang berkaitan dengan indikator, tujuan, dan manfaat objek evaluasi atau bahkan mengkomunikasikan informasi mengenai objek evaluasi dengan pemangku kepentingan.

Rehabilitasi Hutan bertujuan untuk memulihkan kondisi hutan agar dapat berfungsi normal dan lestari sebagai sistem penyangga kehidupan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 76 tentang Reklamasi dan Reklamasi Hutan tahun 2008, reklamasi hutan bertujuan untuk memulihkan, memelihara dan meningkatkan fungsi hutan sehingga dapat menjaga daya dukung, produktivitas dan perannya dalam mendukung system penyangga kehidupan. (Anonim, 2008).

Keberhasilan rencana rehabilitasi hutan sebagian besar dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk faktor teknis, kelembagaan dan sosial ekonomi masyarakat sasaran. Dari segi teknis, kendala yang mereka hadapi antara lain kondisi iklim, tanah dan aspek ekologi lainnya, sedangkan dari aspek kelembagaan seringkali menghadapi kendala dalam melakukan kegiatan karena prosedur proyek berikut ini. Dari segi sosial ekonomi, keberhasilan suatu perencanaan dipengaruhi oleh ide dan

perilaku yang merupakan faktor pendorong partisipasi masyarakat. Pemahaman dan partisipasi publik merupakan faktor kunci untuk mendukung dan memastikan keberhasilan program Rehabilitasi Hutan. Persepsi terkait dengan pemahamannya tentang rencana, dan partisipasi sebagai tindakan sukarela berpartisipasi aktif dalam rencana Rehabilitasi Hutan. (Walangitan 2012) menunjukkan bahwa tingkat kesadaran yang tinggi akan pentingnya konservasi tanah dan air berkorelasi positif dengan bentuk kinerja pertanian pelindung yang diadopsi. Dari uraian di atas, faktor persepsi dan tingkat partisipasi sangat menentukan keberhasilan program.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 menyebutkan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan bertujuan pulihnya kondisi hutan dan lahan sehingga dapat berfungsi kembali secara normal dan lestari sebagai sistem penyangga kehidupan.

Umumnya Rehabilitasi Hutan dilakukan dengan melakukan berbagai kegiatan, salah satunya adalah penanaman di lahan-lahan kritis (Setiawan et al., 2015). Dalam upaya mengetahui tingkat keberhasilan Rehabilitasi Hutan, menekan risiko kegagalan atau meningkatkan tingkat keberhasilan, maka diperlukan berbagai proses tindakan manajemen salah satunya adalah evaluasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Maksum, 2005).

Pertumbuhan penduduk yang pesat dan di tambah lagi dengan penyebarannya yang tidak merata, menyebabkan kebutuhan akan lahan semakin meningkat. Lahan yang sifatnya terbatas terpaksa mengorbankan kawasan hutan demi untuk memenuhi kebutuhan tak terbatas akan perumahan. Proses konversi lahan juga menimbulkan masalah baru, yaitu deforestasi atau perubahan kondisi tutupan lahan dari hutan menjadibukan hutan yang dilakukan dengan cara membakar lahan sehingga menyebabkan terganggunya aktivitas perekonomian dan pencemaran udara (Purnomo, dkk 2017)

Hutan dalam fungsi lindung mengalami kerusakan yang sangat parah. Salah satu penyebab kerusakan adalah kebakaran hutan dan gunung meletus. Kebakaran

hutan dan gunung meletus tersebut mengakibatkan penurunan luas hutan dan keanekaragaman hayati yang awalnya tersedia dalam jumlah yang sangat besar menjadi berkurang. Kebakaran hutan merupakan kerusakan yang bersifat eksplosif, artinya kerusakan kebakaran terjadi dengan cepat dan sangat luas. Upaya kemudian untuk mengendalikan laju kerusakan hutan dan lahan tersebut pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2008 Tentang Rehabilitas dan Reklamasi Hutan menjelaskan Rehabilitas Hutan dan Lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan. Kemudian, yang mengatur penyelenggaraan rehabilitas serta reklamasi hutan pada semua fungsi hutan serta areal penggunaan lain, pembagian kewenangan dan kewajiban bagi pemerintah, pemerintah daerah serta pemegang izin kawasan untuk melakukan penyelenggaraan Rehabilitas Hutan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian.

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyebutkan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang suatu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan (Departemen Kehutanan, 1999).

Fungsi ekosistem hutan sangat berperan dalam berbagai hal seperti sumber penyedia air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna dan peran penyimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting, hal ini dikarenakan hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman (Manan, 1979).

Kerusakan fungsi hutan dan lahan yang diidentifikasi sebagai lahan kritis di Indonesia berdasarkan Penetapan Peta terkait Data Hutan dan Lahan Kritis tahun 2013 yang ditetapkan dengan keputusan Direktur Jendral Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Nomor SK.4/VDAS/2015 seluas 70.181.176 Ha yang terdiri dari 24.303.294 Ha kategori Sangat Kritis sampai dengan Kritis dan 25.878.468 Ha kategori Agak Kritis (Departemen Kehutanan, 2001). Kerusakan hutan dan lahan sudah tersebar di semua fungsi hutan baik pada kawasan lindung,

produksi dan konservasi sehingga menjadi ancaman serius bagi daya dukung fungsinya sebagai penyangga kehidupan.

Direktoral Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PTKL) mencatat, laju deforestasi hutan dan lahan Indonesia pada tahun 2018 sampai 2019 mencapai 465,5 ribu hektar (KEMENLHK, 2020). Banyak faktor yang memicu terjadinya deforestasi dan degradasi hutan, diantaranya adalah kondisi sosial masyarakat sekitar kawasan yang relatif masih rendah, masih terbatasnya akses masyarakat terhadap pemanfaatan sumberdaya hutan, konflik teritorial yang sering berujung pada perebutan lahan, serta tidak seimbangnya permintaan dan persediaan kayu yang berpengaruh terhadap perkembangan industri perindustri nasional (Hakim et al. 2010). Melalui hal ini dapat kita ketahui bahwa sektor kehutanan Indonesia memerlukan sebuah reformasi dalam pembangunan kehutanan Indonesia agar permasalahan-permasalahan tersebut dapat teratasi.

Program Sapi, Jagung, rumput laut (PIJAR) yang digagas oleh Pemerintah Propinsi NTB berimbas pada meningkatnya produktivitas pertanian khususnya pada komoditas jagung di Kabupaten Dompu. Program ini memacu masyarakat untuk mengembangkan komoditas jagung lebih pesat lagi. Alih fungsi hutan menjadi pertanian, penyebab rusaknya hutan di Kabupaten Dompu, bahkan hutan adat di Kecamatan Pekat, juga tak luput dari perladangan liar. Selama hampir 15 tahun, sejak program peningkatan ekonomi masyarakat melalui program jagung, merangsang orang untuk membabat hutan, untuk ditanami jagung. Meski tidak ada intruksi khusus, namun peluang komoditi ini yang menggiurkan, membuat warga nekat, membabat hutan atau istilah lokal disebut "Ngoho", menjadi hal yang tidak bisa lagi dihindari.

Keinginan masyarakat ini berimbas pula pada banyaknya penebangan liar dan alih fungsi lahan yang terjadi seperti konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian, pertanian menjadi non pertanian yang berakibat pada kurangnya luas hutan dan lahan. Perubahan lahan hutan menjadi lahan pertanian umumnya tidak sesuai dengan kemampuan lahannya, sehingga berdampak pada degradasi lahan yang mempunyai ciri-ciri diantaranya adalah terjadinya banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau. Adapun program untuk meningkatkan ekonomi Masyarakat sekitar yang berkaitan dengan hutan tahun 2019 :

1. Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan,  
Arah pengembangan hasil hutan bukan kayu dimaksudkan untuk memberikan arah strategi, program dan kegiatan dalam pengembangan usaha tani budidaya dan pemanfaatan komoditas hasil hutan bukan kayu. Sedangkan tujuannya adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi HHBK, berkembangnya usaha dan pemanfaatan HHBK sehingga HHBK memiliki nilai ekonomi dan daya saing tinggi, serta terciptanya kelestarian lingkungan sesuai dengan kondisi fisik, sosial-ekonomi dan budaya masyarakat setempat.
2. Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan,  
Meningkatnya perdagangan hasil hutan di harapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di desa Doropeti. Namun upaya untuk keluar dari kemiskinan terbukti sulit dan telah menyebabkan marginalisasi lebih lanjut dan terjadinya pelanggaran di beberapa negara. Perlindungan harus diterapkan secara tegas untuk memastikan bahwa perdagangan didasarkan pada pemanfaatan hutan yang sah dan berkelanjutan, kondisi kerja yang adil, dan pembagian keuntungan yang adil. Tata kelola yang baik sangat penting dalam menetapkan aturan untuk produksi dan perdagangan yang berkelanjutan.
3. Pengembangan Jasa Lingkungan Hutan,  
Harapannya dari adanya program ini adalah mempercepat usaha pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan di desa Doropeti. Sehingga memberikan dampak positif dalam upaya menjaga dan melestarikan lingkungan, meningkatkan taraf ekonomi, dan menjaga eksistensi sosial budaya masyarakat sekitar hutan. Tujuan akhirnya adalah hutannya lestari dan masyarakatnya sejahtera.
4. Pengembangan Kawasan Hutan Produksi,  
Hutan Produksi juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat perlindungan keanekaragaman hayati, hal ini cenderung lebih aman dan efektif karena dalam hal eksplorasi pun hutan produksi lebih ketat daripada jenis hutan lain. Sehingga sumber daya alam yang ada di Kawasan hutan desa Doropeti akan lebih terlindungi.

## 5. Pengendalian Pengolahan Dan Peredaran Hasil Hutan.

Tujuan pemerintah dari Pengendalian Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan adalah untuk menjaga keberlanjutan sumber daya hutan dan memastikan pemanfaatan yang berkelanjutan serta bertanggung jawab terhadap hasil-hasil hutan. Tujuan utamanya adalah Konservasi Sumber Daya Alam, Pemanfaatan Berkelanjutan, Pembangunan Ekonomi Masyarakat, Perlindungan Lingkungan, dan Peningkatan Kualitas Hidup.

Sebelum adanya program pijar Degradasi kualitas lingkungan hidup di dompu sudah mengkhawatirkan, terutama kondisi hutan. Kerusakan di Kabupaten Dompu seluas 12.706,17 Ha, dari total luas kawasan hutan 114.495,56 Ha. Pemerintah Kabupaten Dompu melalui Dinas teknisnya melakukan langka-langka strategis dalam memelihara dan menekan laju kerusakan hutan dengan berbagai program kegiatan yaitu Pembuatan hutan rakyat, Penyaluran atau pembagian bibit bakti sosial untuk masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Setelah adanya program pijar Menurut Fungsi dan statusnya kawasan hutan Kabupaten Dompu terdiri dari Hutan Cagar Alam seluas 2.435,50 Ha, Suaka Margasatwa 2.254,50 Ha, Taman Buru 6.532,60 Ha, Hutan Lindung 49.189,35 Ha, Hutan Produksi Terbatas 25.285,81 Ha, dan Hutan Produksi Konservasi seluas 28.797,80 Ha.

Pemanfaatan sumber daya hutan yang dilaksanakan pada masa lalu kurang memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan yang berkelanjutan. Pemanfaatannya dilakukan secara tidak efisien dan berorientasi pada kepentingan jangka pendek. Hal ini menyebabkan terjadinya pemanfaatan secara tidak terkendali yang berakibat pada kerusakan ekosistem, hidrologi dan fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan. Kerusakan-kerusakan tersebut bila terus berlanjut tanpa adanya upaya-upaya perbaikan dan pengelolaan yang ditata secara sistematis dan terpadu dengan melibatkan semua stakeholders, maka dapat dipastikan akan terjadi degradasi secara drastis fungsi hutan dalam waktu singkat. Sejalan dengan itu kepunahan dan kelangkaan dari keanekaragaman hayati yang ada tidak dapat dihindari, sehingga pada generasi berikutnya hanya mendapat dampak negatif dari hal tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, Balai Taman Nasional Tambora melalui program Rehabilitas Hutan dan Lahan (RHL) tahun 2019 melakukan penanaman di Resort Doroncanga seluas 700 Hektar dengan jenis tanaman hutan seperti Kepuh

(*Sterculia poitida*), Ketapang (*Terminalia catappa*), Mpusu (*Ficus sp*), Kalonggo (*Duabanga maluccana*) dan lainnya yang berlokasi pada Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu yang merupakan kawasan Taman Nasional Tambora dengan luas areal seluas 71.645,74 Hektar. Maka, untuk mengetahui tingkat keberhasilan tanaman hasil Rehabilitas Hutan di Desa Doropeti Kawasan Taman Nasional Tambora Resort Doroncanga maka penting dilakukan penilaian atau evaluasi Tanaman Rehabilitas Hutan pasca tahun 2019 dengan harapan nantinya dapat meningkatkan fungsi sumberdaya hutan bisa dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dan memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai hasil pelaksanaan kegiatan Rehabilitas Hutan yang objektif, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Kerusakan hutan yang terjadi di Kabupaten Dompu yang disebabkan antara lain:

1. Penebangan Liar

Penebangan liar masih marak terjadi di Kabupaten Dompu yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, meskipun Dinas Kehutanan dan Aparat Terkait melakukan pengawasan. Kerusakan hutan akibat penebangan liar sampai pada tahun 2021 mencapai 12.706,17 Ha

2. Peladangan liar

Peladangan liar yang dilakukan oleh masyarakat yang dijadikan sebagai lahan pertanian pada tahun-tahun terakhir ini sudah hampir tidak ada, ini berkat pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu dan aparat terkait dan kerusakan hutan akibat peladangan sampai pada tahun 2021 mencapai 16.037,86 Ha.

3. Perambahan Hutan

Perambahan hutan atau dapat dikatakan sebagai pemanfaatan kawasan hutan tanpa ijin dengan melakukan kegiatan usaha pertanian menetap dan diikuti pembangunan pemukiman yang merubah fungsi terjadi di beberapa Kawasan Hutan seperti pada beberapa wilayah hutan terjadi perluasan wilayah Desa ke dalam kawasan hutan. Menurut data tahun 2021 terdapat sekitar 535 Ha dengan sebaran yang tidak merata pada setiap Kelompok Hutan. Tekanan Sosial Ekonomi terhadap hutan akibat aksesibilitas yang tinggi serta pertumbuhan jumlah penduduk yang berimplikasi pada



kebutuhan pemenuhan ekonomi sehingga mendorong perambahan hutan yang cukup signifikan.

Permasalahan dampak pelaksanaan Rehabilitasi Hutan menjadi lebih rumit karena Rehabilitasi Hutan bersifat jangka panjang akan sangat penting untuk menjaga konsistensi pengambil kebijakan Rehabilitasi Hutan dan penerapan kebijakan Rehabilitasi Hutan tersebut dan Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Dompu sebagai penanggung jawab kegiatan Rehabilitasi Hutan sampai saat ini belum menetapkan kriteria untuk melakukan evaluasi keberhasilan Rehabilitasi Hutan lebih detail. Dampak program Rehabilitasi Hutan tidak hanya ditujukan untuk perbaikan lingkungan tetapi diharapkan berpengaruh positif pada kondisi sosial ekonomi masyarakat sehingga dalam evaluasi capaian program Rehabilitasi Hutan diperlukan ukuran lain yang mampu mengukur kompleksitas program Rehabilitasi Hutan.

Desa Doropeti merupakan salah satu Desa yang berdampak pada kegiatan rehabilitasi hutan di Kawasan Taman Nasional Tambora, kerusakan hutan sudah tersebar di semua fungsi hutan baik pada kawasan lindung, produksi dan konservasi sehingga menjadi ancaman serius bagi daya dukung fungsinya sebagai penyangga kehidupan. Balai Taman Nasional Tambora melalui program Rehabilitasi Hutan tahun 2019 melakukan penanaman di Resort Doroncanga seluas 700 Hektar dengan jenis tanaman hutan seperti Kepuh (*Sterculia poitida*), Ketapang (*Terminalia catappa*), Mpusu (*Ficus sp*), Kalonggo (*Duabanga maluccana*) dan lainnya yang berlokasi pada Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu yang merupakan kawasan Taman Nasional Tambora dengan luas areal seluas 71.645,74 Hektar.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu membatasi permasalahan yang dikaji. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tingkat Keberhasilan Program Rehabilitasi Hutan di Desa Doropeti Kawasan Taman Nasional Tambora?

## **1.3 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat keberhasilan program

Rehabilitas Hutan pada kawasan Taman Nasional Tambora Resort Doro Ncanga di Desa Doropeti, Kecamatan Pekat.. Maka dari itu sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi kondisi kerusakan hutan pada Desa Doropeti Kawasan Taman Nasional Tembora.
2. Mengidentifikasi efektifitas program rehabilitasi hutan yang sudah dilakukan di Desa Doropeti Kawasan Taman Nasional Tembora.

#### **1.4 Ruang Lingkup**

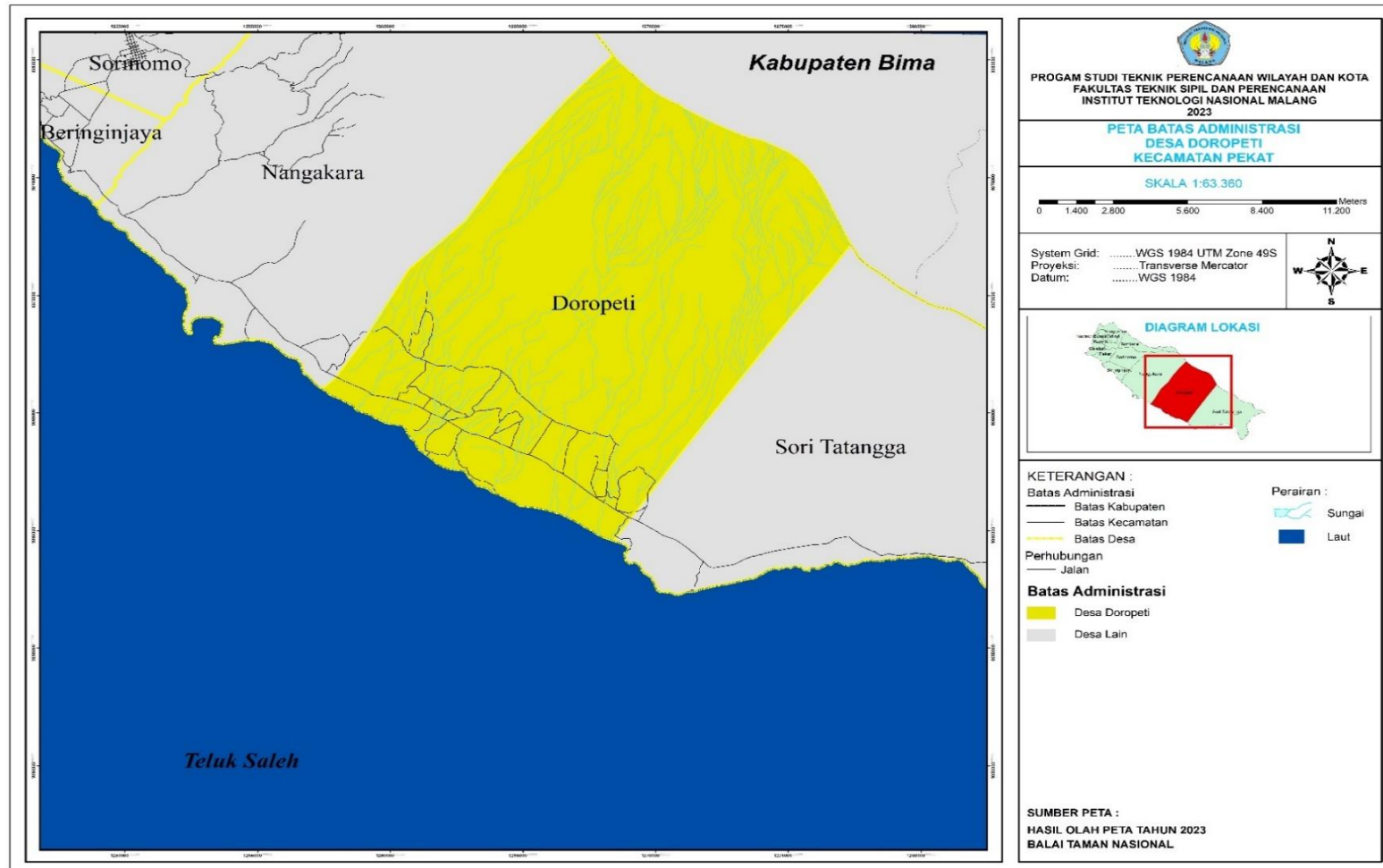
Ruang lingkup penelitian ini terbagi menjadi ruang lingkup lokasi dan ruang lingkup materi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian di bawah ini.

##### **1.4.1 Ruang Lingkup Lokasi**

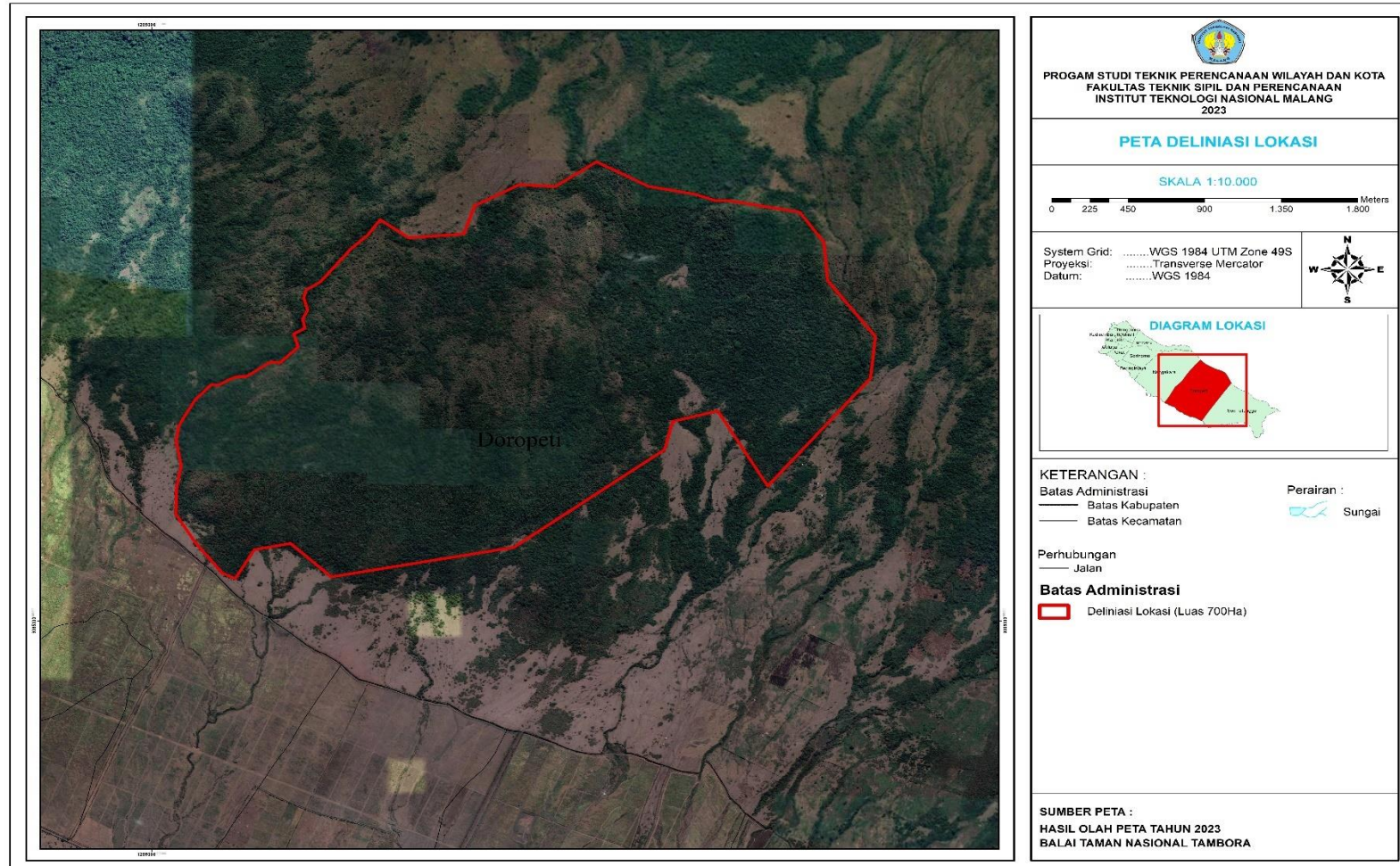
Penelitian ini dilakukan di Desa Doropeti Pada Kawasan Taman Nasional Tambora Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. Alasan dalam menentukan lokasi di Desa Doropeti adalah Desa Doropeti merupakan salah satu Desa yang berdampak pada kegiatan rehabilitasi hutan di Kawasan Taman Nasional Tembora, kerusakan hutan sudah tersebar di semua fungsi hutan baik pada kawasan lindung, produksi dan konservasi sehingga menjadi ancaman serius bagi daya dukung fungsinya sebagai penyangga kehidupan. Balai Taman Nasional Tambora melalui program Rehabilitas Hutan tahun 2019 melakukan penanaman di Resort Doroncanga seluas 700 Hektar dengan jenis tanaman hutan seperti Kepuh (*Sterculia poitida*), Ketapang (*Terminalia catappa*), Mpusu (*Ficus sp*), Kalonggo (*Duabanga maluccana*) dan lainnya yang berlokasi pada Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu yang merupakan kawasan Taman Nasional Tambora dengan luas areal seluas 71.645,74 Hektar. Desa Doropeti berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bima
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Saleh
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nangakara
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Soritatangga

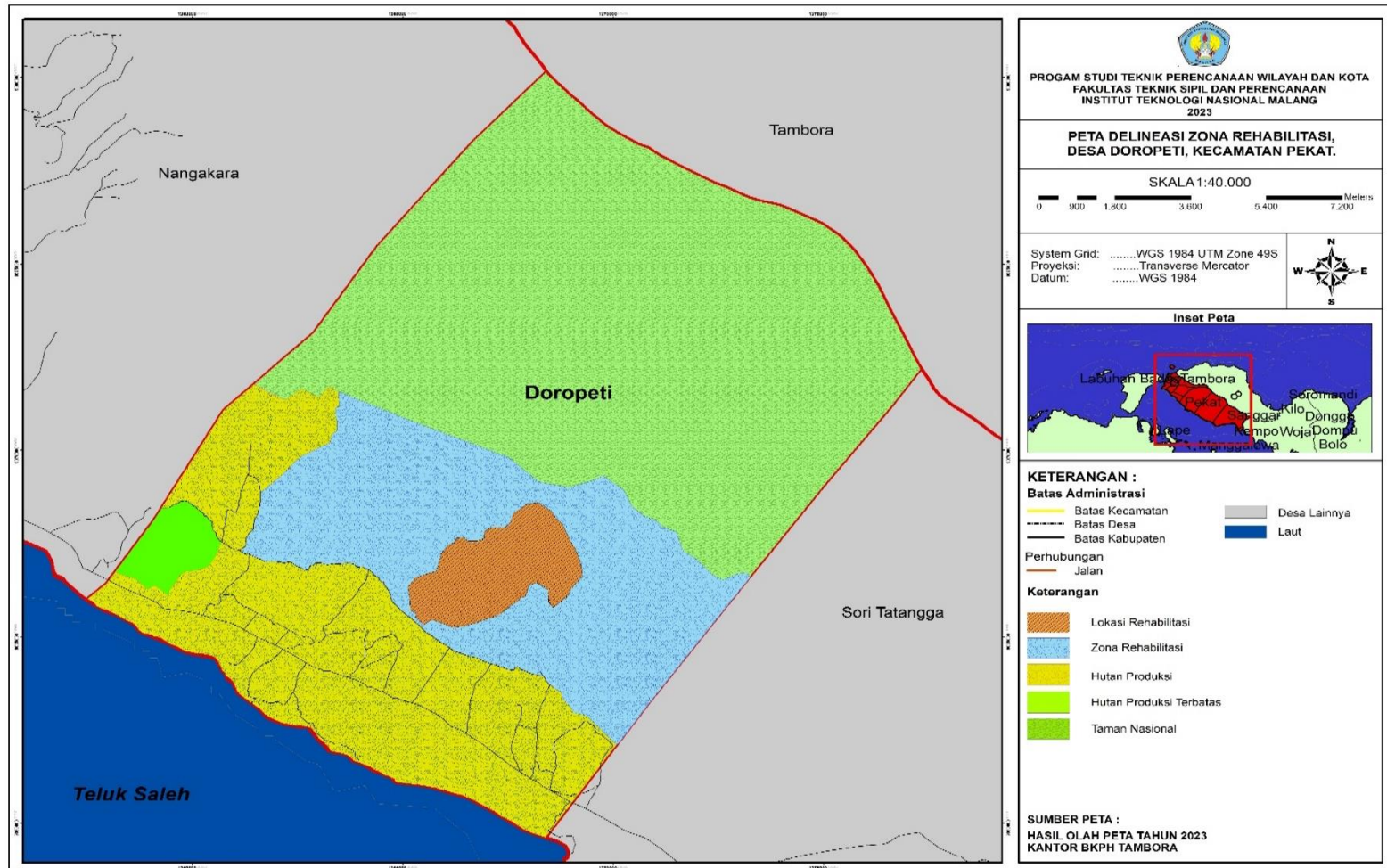
Gambar 1. 1 Peta Batas Administrasi Desa Doropeti



**Gambar 1. 2 Peta Lokasi Penelitian (Desa Doropeti, Kawasan Taman Nasional Tembora)**



Gambar 1. 3 Peta Delineasi Zona Rehabilitasi Desa Doropeti



#### 1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi dalam penelitian ini membahas mengenai batasan teori yang digunakan dalam merumuskan sasaran yang telah diuraikan diatas.

1. Mengetahui kondisi kerusakan hutan di Desa Doropeti, Kecamatan Pekat. Dalam ruang lingkup ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi kerusakan hutan di Desa Doropeti, Kecamatan Pekat dengan melihat kondisi eksisting yang ada di lokasi penelitian. Analisis ini dilakukan baik dengan melakukan pengamatan atau observasi dan dengan adanya metode ini didasarkan pada pendekatan pencocokan (matching) antara karakteristik iklim dan sumberdaya lahan serta tindakan pengelolaan. Lingkup materi dalam sasaran pertama adalah Semak belukar, Kebun campuran, Tegalan, Padang rumput, Lahan terbuka dan Permukiman
2. Mengetahui efektifitas program rehabilitasi hutan yang sudah dilakukan. Dalam ruang lingkup ini dilakukan untuk mengetahui efektifitas program rehabilitasi hutan yang sudah dilakukan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara, Studi Literatur. Metode Analisis Data ruang lingkup kedua ini, peneliti menggunakan triangulasi, adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.

**1.5 Kerangka Pikir**

**“EVALUASI PROGRAM REHABILITAS HUTAN DI DESA DOROPETI KAWASAN TAMAN NASIONAL TAMBORA KECAMATAN PEKAT KABUPATEN DOMPU”**

**Latar Belakang**

Kerusakan hutan sudah tersebar di semua fungsi hutan baik pada kawasan lindung, produksi dan konservasi sehingga menjadi ancaman serius bagi daya dukung fungsinya sebagai penyangga kehidupan. Balai Taman Nasional Tambora melalui program Rehabilitas Hutan tahun 2019 melakukan penanaman di Resort Doroncanga seluas 700 Hektar dengan jenis tanaman hutan seperti Kepuh (*Sterculia poitida*), Ketapang (*Terminalia catappa*), Mpusu (*Ficus sp*), Kalonggo (*Duabanga maluccana*) dan lainnya yang berlokasi pada Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompus yang merupakan kawasan Taman Nasional Tambora dengan luas areal seluas 71.645,74 Hektar.

**Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat keberhasilan program Rehabilitas Hutan pada kawasan Taman Nasional Tambora Resort Doro Ncanga di Desa Doropeti, Kecamatan Pekat

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu membatasi permasalahan yang dikaji. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tingkat Keberhasilan Program Rehabilitasi Hutan Di Desa Doropeti pada kawasan Taman Nasional Tambora?

**Sasaran**

1. Mengidentifikasi kondisi kerusakan hutan di Desa Doropeti, Kecamatan Pekat.
2. Mengidentifikasi efektifitas program rehabilitasi hutan yang sudah dilakukan di Desa Doropeti, Kecamatan Pekat.

**Analisis tingkat kerusakan hutan**  
Digunakan untuk mengetahui tingkat degradasi lahan yaitu dengan sistem Pakar (Expert System/EXSYS). Model regresi ganda (multiple regression) digunakan untuk mengetahui hubungan variabel bebas(X) dengan variabel terikat (Y) yang

**Analisa Efektifitas Program Rehabilitasi Hutan**  
Untuk mengetahui efektivitas program Rehabilitasi Hutan pada kawasan Taman Nasional Tambora Desa Doropeti, Kecamatan Pekat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara, Studi Literatur.

**Output :**  
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat keberhasilan Program Rehabilitas Hutan pada Kawasan Taman Nasional Tambora di Desa Doropeti Kecamatan Pekat.

## **1.6 Manfaat dan Keluaran**

Mengenai manfaat dan keluaran dari penelitian yang dilakukan baik itu manfaat yang bersifat teoritis maupun manfaat praktis, selain itu juga akan di bahas mengenai keluaran atau output dari penelitian yang dilakukan.

### **1.6.1 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini akan dibagi menjadi dua manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada uraian di bawah ini.

#### **1.6.1.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah manfaat penelitaian yang diterapkan menggunakan teori atau pengetahuan untuk mengembangkan pengetahuan pembaca. Berikut adalah uraian dari manfaat teoritis.

1. Bermanfaat sebagai bahan kajian atau informasi mengenai kondisi kerusakan hutan pada Kawasan Taman Nasional Tambora Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu bagi yang membutuhkan.
2. Bermanfaat sebagai ilmu untuk bahan bacaan, informasi yang sangat bermanfaat terkait dengan pengelolaan hutan yang ada di Desa Doropeti Taman Nasional Tambora khususnya dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk melaksanakan penelitian selanjutnya di Kawasan Taman Nasional Tambora di Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu bagi yang membutuhkan.

#### **1.6.1.2 Manfaat Praktis**

Manfaat prkatis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah manfaat secara langsung bagi suatu daerah. Berikut adalah uraian dari manfaat praktis dari penelitian ini.

1. Akan memberikan hasil positif terkait kondisi kerusakan hutan pada Kawasan Taman Nasional Tambora Desa Doropeti dengan kemampuan potensi yang dimiliki dan permasalahan yang ada kepada Pemerintah Desa. Memberikan bahan pertimbangan dalam rehabilitasi yang lebih maju untuk



Kawasan hutan di Desa Doropeti Kawasan Taman Nasional Tambora, Kecamatan Pekat.

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi informasi baru mengenai pelaksanaan dan hasil Rehabilitas Hutan di Desa Pekat kawasan Taman Nasional Tambora Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu sehingga dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan terkait Rehabilitas Hutan dan dampak positif masyarakat sekitar.

### **1.6.2 Keluaran Penelitian**

Keluaran atau output dari penelitian yang dilakukan ini berdasarkan beberapa sasaran yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Adapun keluaran atau output penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui kondisi kerusakan hutan pada Desa Doropeti Kawasan Taman Nasional Tambora. Keluaran dari sasaran ini adalah teridentifikasinya kondisi kerusakan hutan pada Desa Doropeti Kawasan Taman Nasional Tambora Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu.
2. Mengetahui efektifitas program rehabilitasi hutan yang sudah dilakukan di Desa Doropeti Kawasan Taman Nasional Tambora. Keluaran dari sasaran ini adalah Mengidentifikasi efektifitas program rehabilitasi hutan yang sudah dilakukan di Desa Doropeti Kawasan Taman Nasional Tambora.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Penulisan dalam penelitian ini akan menggunakan sistematika penulisan yaitu, pendahuluan, keluaran dan manfaat penelitian, kajian teori dan metodologi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada uraian di bawah ini.

**BAB I PENDAHULUAN** Pada bab I pendahuluan akan dibahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian, tujuan dan sasaran penelitian, serta ruang lingkup penelitian yang meliputi ruang lingkup lokasi dan ruang lingkup materi. Pada bagian ini juga dibahas mengenai sistematika penulisan dan kerangka pikir serta keluaran dan masukan akan dibahas mengenai

keluaran atau output yang akan dihasilkan dari penelitian ini. Selain itu juga akan membahas mengenai manfaat penelitian berupa manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Pada bagian bab II yaitu kajian pustaka akan dibahas mengenai teori-teori serta penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun kajian teori ini akan membahas mengenai Teori Hutan, Teori Rehabilitasi, Teori Evaluasi, dan Teori Rehabilitasi Hutan. Selain itu pada bagian ini juga akan membahas sintesa variabel.

## **BAB III METODOLOGI**

Pada bab III membahas tentang metodologi yang berisikan jenis penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan. Dalam metode pengumpulan data meliputi metode pengumpulan data primer dan sekunder.

## **BAB IV GAMBARAN WILAYAH**

Pada bab IV membahas tentang gambaran umum wilayah penelitian, diantaranya gambaran wilayah Kabupaten Dompu, gambaran wilayah Kecamatan Pekat, gambaran wilayah Desa Doropeti dan Gambaran umum Kawasan Taman Nasional Tambora.

## **BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab V membahas mengenai hasil analisis dan pembahasan yang berkaitan dengan analisis karakteristik kawasan hutan dan analisis efektifitas program rehabilitasi hutan pada Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu.

## **BAB VI PENUTUP**

Pada bab VI berisikan mengenai kesimpulan dan rekomendasi untuk pemerintah, masyarakat, serta akademisi/peneliti selanjutnya